

POSISI INDONESIA DI PBB
ORGANISASI INTERNASIONAL DAN GLOBALISASI

Dosen Pengampu : Prof. Intan Fitri,S.A.N., M.A., Ph.D.

Mata Kuliah : Organisasi Internasional dan Globalisasi



Nama Anggota :

Aldiva Mukhsin	2316041130
Andreas Angga Asmaranata	2316041136
Raihan Ufaldo	2356041044
Sasi Kirana Zahrani	2316041041
Angelica Ivana Nadia C. H	2316041085

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional utama dalam sistem global. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dari berbagai sumber ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sejarah keanggotaan yang dinamis serta kontribusi signifikan, terutama dalam misi perdamaian dunia dan isu-isu global seperti hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan. Indonesia juga menempati posisi strategis sebagai negara berkembang dan *middle power* yang aktif dalam diplomasi multilateral, termasuk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan pengaruh dibandingkan negara besar. Dengan demikian, diperlukan upaya untuk meningkatkan peran Indonesia agar lebih optimal dalam tatanan global.

Kata kunci: Indonesia, PBB, organisasi internasional, diplomasi multilateral

ABSTRACT

This study aims to analyze Indonesia's position within the Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN) as a major international organization in the global system. This research uses a qualitative approach with a literature review method. The findings show that Indonesia has a dynamic membership history and has made significant contributions, particularly in peacekeeping missions and global issues such as human rights and sustainable development. Indonesia also holds a strategic position as a developing country and a middle power actively engaged in multilateral diplomacy, including its role as a non-permanent member of the UN Security Council. However, Indonesia still faces challenges due to its limited influence compared to major powers, indicating the need to strengthen its global role.

Keywords: Indonesia, United Nations, international organization, multilateral diplomacy

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi yang semakin kompleks, hubungan antar negara tidak lagi dapat dijalankan secara unilateral, melainkan membutuhkan kerja sama melalui berbagai mekanisme multilateral. Interdependensi antar negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan menuntut adanya koordinasi yang lebih terstruktur dalam menghadapi berbagai permasalahan global. Organisasi internasional kemudian hadir sebagai sarana untuk memfasilitasi kerja sama tersebut, sekaligus menjadi wadah bagi negara-negara untuk menyampaikan kepentingan nasionalnya dalam forum global. Dalam konteks ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memainkan peran penting sebagai organisasi internasional terbesar yang berfokus pada pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia.

PBB tidak hanya berfungsi sebagai forum diskusi internasional, tetapi juga sebagai aktor utama dalam penyelesaian konflik, penegakan hak asasi manusia, serta promosi pembangunan berkelanjutan. Melalui berbagai badan dan programnya, PBB berupaya menciptakan tatanan dunia yang lebih stabil dan berkeadilan. Keberadaan PBB menjadi semakin relevan di tengah meningkatnya tantangan global seperti konflik bersenjata, perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, dan krisis kemanusiaan. Oleh karena itu, keikutsertaan negara-negara anggota dalam PBB menjadi sangat penting untuk memastikan efektivitas organisasi ini dalam mencapai tujuannya.

Sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif, Indonesia memiliki komitmen kuat untuk terlibat dalam berbagai upaya kerja sama internasional. Keterlibatan Indonesia dalam PBB dimulai sejak tahun 1950, meskipun sempat mengalami dinamika politik ketika Indonesia menarik diri pada tahun 1965 dan kembali menjadi anggota pada tahun 1966. Sejak saat itu, Indonesia terus menunjukkan eksistensinya dalam berbagai kegiatan PBB, baik melalui kontribusi dalam misi perdamaian dunia, partisipasi dalam forum internasional, maupun keterlibatan dalam isu-isu global seperti hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks global, Indonesia sering dipandang sebagai negara dengan posisi strategis, terutama sebagai representasi negara berkembang atau *Global South*. Selain itu, Indonesia juga dikenal sebagai negara *middle power* yang aktif dalam diplomasi multilateral. Hal ini terlihat dari keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum internasional, termasuk keanggotaannya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dalam beberapa periode.

Posisi ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk berperan lebih besar dalam mempengaruhi kebijakan global, meskipun dalam praktiknya masih terdapat berbagai keterbatasan yang perlu dihadapi.

Meskipun Indonesia telah menunjukkan berbagai kontribusi dalam PBB, pertanyaan mengenai sejauh mana pengaruh dan posisi strategis Indonesia dalam organisasi tersebut masih menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Tantangan seperti keterbatasan kekuatan ekonomi, dinamika politik global, serta dominasi negara-negara besar dalam pengambilan keputusan menjadi faktor yang mempengaruhi peran Indonesia. Di sisi lain, peluang untuk meningkatkan posisi Indonesia tetap terbuka melalui penguatan diplomasi, peningkatan kontribusi, serta kerja sama dengan negara-negara lain. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis secara lebih mendalam posisi Indonesia dalam PBB, baik dari segi peran, pengaruh, maupun prospek ke depannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah dan dinamika keanggotaan Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)?
2. Bagaimana peran dan kontribusi Indonesia dalam berbagai kegiatan dan agenda PBB?
3. Bagaimana posisi strategis Indonesia dalam PBB sebagai negara berkembang dan middle power?
4. Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia dalam meningkatkan perannya di PBB?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan sejarah dan dinamika keanggotaan Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
2. Untuk menganalisis peran dan kontribusi Indonesia dalam berbagai kegiatan dan agenda PBB.
3. Untuk mengkaji posisi strategis Indonesia dalam PBB sebagai negara berkembang dan middle power.
4. Untuk mengidentifikasi tantangan serta peluang Indonesia dalam meningkatkan perannya di PBB

BAB 2

LITERATURE REVIEW

2.1 Pengertian Organisasi Internasional

2.1.1 Definisi Organisasi Internasional

Organisasi internasional (OI) adalah wadah formal antarnegara yang dibentuk melalui perjanjian untuk mencapai tujuan bersama. Konvensi Wina (1969) menyebutnya sebagai "organisasi antar-pemerintah"; Potter (1935) mendefinisikannya sebagai asosiasi bangsa-bangsa demi kepentingan kolektif; Keohane (1984) menekankan fungsinya dalam mengurangi biaya transaksi antarnegara; Hurd (2011) memandangnya sebagai arena interaksi berkelanjutan; Abbott & Snidal (1998) menyoroti kapasitasnya dalam menegakkan norma komunitas; dan Bull (1977) menekankan perannya dalam memelihara ketertiban dunia. Tabel 3.1 merangkum perbandingan definisi tersebut.

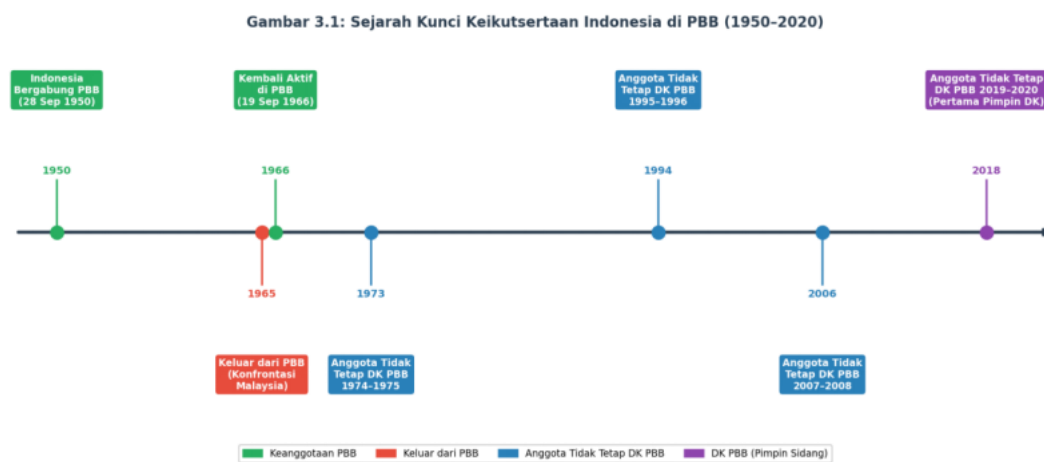
Tabel 3.1 Perbandingan Definisi Organisasi Internasional Menurut Para Ahli

Definisi & Sumber	Tujuan	Anggota	Wewenang	Contoh
Potter (1935)	Tujuan bersama (kerjasama)	Negara berdaulat	Perjanjian multilateral	PBB, Liga Bangsa-Bangsa
Konvensi Wina (1969)	Kerjasama antar pemerintah	Negara-negara	Norma traktat	PBB, ASEAN
Keohane (1984)	Mengurangi biaya transaksi antarnegara	Negara internasional	Forum perundingan berulang	WTO, UNDP
Hurd (2011)	Forum negosiasi berkelanjutan	Negara anggota	Struktur birokrasi (sekretariat)	WHO, Org. regional PBB
Abbott & Snidal (1998)	Sentralisasi & penegakan norma komunitas	Negara (lembaga)	Aturan formal terpusat	IMF, Bank Dunia, NATO
Bull (1977)	Tatanan dunia yang adil & damai	Negara aktif	Keputusan kolektif	DK PBB

Sumber: Diolah dari berbagai literatur (Potter, 1935; Konvensi Wina, 1969; Keohane, 1984; Hurd, 2011; Abbott & Snidal, 1998; Bull, 1977)

2.1.2 Fungsi dan Sejarah Indonesia di PBB

Karns & Mingst (2010) mengidentifikasi lima fungsi utama OI: kerja sama antarnegara, pemeliharaan perdamaian (Indonesia berkontribusi melalui Pasukan Garuda), pembentukan hukum internasional, pembangunan ekonomi melalui SDGs, dan perlindungan HAM. Indonesia bergabung dengan PBB pada 28 September 1950, sempat menarik diri pada 1965 akibat Konfrontasi Malaysia, lalu kembali aktif pada 19 September 1966. Sejak itu Indonesia telah empat kali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB (1973–74, 1995–96, 2007–08, 2019–20) dan pertama kali memimpin sidang DK pada 2019. Gambar 3.1 mengilustrasikan perjalanan sejarah tersebut.



Gambar 3.1: Sejarah Kunci Keikutsertaan Indonesia di PBB (1950–2020)

2.2 Teori Peran Negara dalam Organisasi Internasional

Konsep middle power (Cooper, 1997) menggambarkan negara yang tidak mendominasi sistem internasional namun aktif dalam diplomasi multilateral dengan tiga ciri: International in focus, Multilateral in method, dan Good citizen in conduct—ketiganya terpenuhi oleh Indonesia. Diplomasi multilateral (Keohane, 1984) memperkuat posisi tawar negara melalui shadow of the future dan prinsip timbal balik, yang dimanfaatkan Indonesia untuk memajukan agenda perdamaian dengan pendekatan dialog (Purba & Anugrah, 2019). Dari perspektif Global South, Dependency Theory (Frank, 1967) dan teori pascakolonial (Said, 1978) mendorong Indonesia untuk memperjuangkan reformasi tata kelola global, isu Palestina, dan perubahan iklim di PBB. Tabel 3.2 menyajikan perbandingan perspektif teoritis yang relevan.

Tabel 3.2 Perbandingan Perspektif Teoritis Peran Negara di PBB

Perspektif	Penulis Kunci	Inti Argumen	Implikasi untuk Indonesia
Realisme	Mearsheimer (2001)	Negara mengejar kekuasaan; OI cermin distribusi kekuatan dunia.	Indonesia terbatas oleh veto DK; fokus keamanan nasional & aliansi ASEAN.
Liberalisme Institusional	Keohane (1984)	OI memfasilitasi kerjasama dan mengurangi ketidakpastian.	Indonesia memanfaatkan PBB untuk manfaat kolektif (bantuan, pasar, keamanan).
Middle Power	Cooper (1997); Robertson & Carr (2023)	Negara menengah: International in focus, Multilateral in method, Good citizen in conduct.	Indonesia berperan konstruktif melalui PKO dan diplomasi multilateral.
Ketergantungan (Dependency)	Frank (1967); Cardoso (1979)	Negara berkembang terjebak dalam struktur ekonomi global yang memihak negara maju.	Indonesia mendorong reformasi sistem perdagangan & investasi di forum PBB.
Pascakolonial / Global South	Said (1978); Narlikar (2005)	Wacana global dipengaruhi warisan kolonial; solidaritas Selatan perlu diperkuat.	Indonesia memperjuangkan isu kedaulatan, iklim, dan pembangunan di PBB.

Sumber: Diolah dari berbagai literatur (Mearsheimer, 2001; Keohane, 1984; Cooper, 1997; Frank, 1967; Said, 1978)

2.3 Studi Terdahulu

Berbagai penelitian terdahulu mengkaji peran Indonesia di PBB dari sudut pandang yang saling melengkapi. Arhanudya & Rizerius (2023) menemukan bahwa pengiriman Pasukan Garuda secara konsisten meningkatkan reputasi Indonesia sebagai peacebuilder internasional. Hutabarat (2018) mengidentifikasi era SBY sebagai puncak partisipasi perdamaian Indonesia dan merekomendasikan penyusunan white paper nasional menuju target 10 besar penyumbang pasukan PBB. Purba & Anugrah (2019) menunjukkan bahwa keanggotaan DK 2019–2020 didorong komitmen ideologis UUD 1945, bukan sekadar kalkulasi geopolitik. Seba (2021) menemukan efektivitas kepresidenan DK Indonesia terkendala hak veto kekuatan besar, sementara Jubaidi & Budiman (2021) mendokumentasikan fasilitasi perdamaian Afghanistan sebagai contoh konkret middle-power diplomacy. Hidriyah (2018) mencatat manfaat simbolis keanggotaan DK dalam isu Palestina dan HAM, meski pengaruhnya terhadap resolusi konflik masih terbatas.

2.3.1 Kesenjangan Penelitian (Research Gap)

Berbagai penelitian terdahulu mengkaji peran Indonesia di PBB dari sudut pandang yang saling melengkapi. Arhanudya & Rizerius (2023) menemukan bahwa pengiriman Pasukan Garuda secara konsisten meningkatkan reputasi Indonesia sebagai peacebuilder internasional. Hutabarat (2018) mengidentifikasi era SBY sebagai puncak partisipasi perdamaian Indonesia dan merekomendasikan penyusunan white paper nasional menuju target 10 besar penyumbang pasukan PBB. Purba & Anugrah (2019) menunjukkan bahwa keanggotaan DK 2019–2020 didorong komitmen ideologis UUD 1945, bukan sekadar kalkulasi geopolitik. Seba (2021) menemukan efektivitas kepresidenan DK Indonesia terkendala hak veto kekuatan besar, sementara Jubaidi & Budiman (2021) mendokumentasikan fasilitasi perdamaian Afghanistan sebagai contoh konkret middle-power diplomacy. Hidriyah (2018) mencatat manfaat simbolis keanggotaan DK dalam isu Palestina dan HAM, meski pengaruhnya terhadap resolusi konflik masih terbatas.

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu sebuah metode yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan fenomena sosial secara mendalam berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Metode ini dipilih karena mampu memberikan penjelasan yang komprehensif tentang posisi Indonesia dalam hubungan internasional, khususnya dalam keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pendekatan kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis peran, kebijakan, serta kontribusi Indonesia di PBB tidak hanya dengan mengandalkan angka atau statistik, tetapi juga dengan memahami konteks sejarah, politik, dan dinamika global yang memengaruhinya.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah studi literatur. Peneliti mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber yang relevan dan terpercaya, antara lain:

- a. Jurnal ilmiah yang membahas tentang hubungan internasional dan peran Indonesia di PBB
- b. Buku akademik yang berkaitan dengan organisasi internasional
- c. Laporan resmi dari lembaga pemerintah serta organisasi internasional
- d. Artikel dari situs resmi, termasuk website Perserikatan Bangsa-Bangsa

Dengan menggunakan teknik ini, data yang diperoleh diharapkan dapat memberikan gambaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai posisi Indonesia di PBB.

3.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai adalah analisis deskriptif-analitis, yang berarti menguraikan data yang telah dikumpulkan dan kemudian menganalisisnya secara terstruktur. Dalam studi ini, peneliti tidak hanya mendeskripsikan fakta yang berkaitan dengan keanggotaan serta peran Indonesia di PBB, tetapi juga menganalisis bagaimana posisi Indonesia terbentuk, berkembang, dan pengaruhnya dalam kancah internasional.

Analisis ini dilakukan dengan menghubungkan data historis, kebijakan luar negeri, serta kontribusi Indonesia di berbagai aktivitas PBB untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam

BAB 4

PEMBAHASAN

4.1 Riwayat Indonesia di PBB

Indonesia secara resmi menjadi bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 28 September 1950. Keanggotaan ini diperoleh tak lama setelah Indonesia mendapatkan pengakuan atas kedaulatannya dari Belanda pada tahun 1949. Bergabungnya Indonesia dengan PBB menandakan bahwa bangsa ini diakui oleh komunitas internasional sebagai negara independent dan berdaulat, serta menunjukkan komitmen untuk berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia.

Di awal keanggotaannya, Indonesia secara aktif menjalin kemitraan dengan negara lain melalui berbagai forum PBB. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, yang berarti tidak terikat pada blok tertentu, namun tetap berperan dalam menciptakan perdamaian global. Namun, pada tahun 1965, Indonesia membuat langkah yang cukup kontroversial dengan menarik diri dari PBB. Langkah ini diambil di bawah kepemimpinan Soekarno sebagai respon terhadap diterimanya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Pada saat itu, Indonesia terlibat dalam konflik politik dengan Malaysia yang dikenal dengan sebutan Konfrontasi Indonesia-Malaysia.

Penarikan Indonesia dari PBB menunjukkan sikap politik luar negeri yang cenderung bersifat konfrontatif dan terpengaruh oleh keadaan Perang Dingin. Indonesia sempat juga mengusulkan pembentukan organisasi alternatif PBB yang disebut CONEFO (Konferensi Kekuatan Baru yang Muncul), meskipun tidak bertahan lama. Setelah terjadinya perubahan dalam politik domestik, Indonesia kembali bergabung dengan PBB pada 28 September 1966 di bawah kepemimpinan Soeharto. Kembalinya Indonesia menandai pergeseran dalam arah politik luar negeri yang menjadi lebih moderat, terbuka, dan berfokus pada kolaborasi internasional. Sejak saat itu, hubungan Indonesia dengan PBB berkembang dengan pesat. Indonesia tidak hanya aktif sebagai anggota, tetapi juga turut ambil bagian dalam berbagai inisiatif penting yang dilaksanakan oleh PBB. Salah satu kontribusi signifikan Indonesia adalah keterlibatan dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia dengan mengirimkan Pasukan Garuda ke beberapa negara yang tengah berkonflik di bawah naungan PBB.

Selain itu, Indonesia aktif dalam forum internasional yang diadakan oleh PBB, seperti isu pembangunan berkelanjutan, hak asasi manusia, dan penanggulangan perubahan iklim.

Indonesia bahkan beberapa kali terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, yang mencerminkan penghargaan dari komunitas internasional terhadap peran negara ini.

4.2 Peran Indonesia di PBB

Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki peran yang cukup strategis dalam menjaga perdamaian dan stabilitas internasional. Keterlibatan Indonesia dalam organisasi ini dilandasi oleh prinsip politik luar negeri bebas aktif, yang menekankan bahwa Indonesia tidak memihak kekuatan tertentu, namun tetap aktif dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Melalui prinsip tersebut, Indonesia berusaha berkontribusi secara nyata dalam berbagai agenda global yang berada di bawah naungan PBB.

Salah satu bentuk peran nyata Indonesia di PBB adalah melalui partisipasi dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia. Indonesia secara konsisten mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke berbagai wilayah konflik sebagai bagian dari komitmen terhadap keamanan internasional. Keterlibatan ini tidak hanya mencerminkan tanggung jawab moral Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, tetapi juga menunjukkan kemampuan Indonesia dalam mendukung penyelesaian konflik secara damai. Selain itu, kontribusi dalam misi perdamaian juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang aktif dalam menjaga stabilitas global. Di samping itu, Indonesia juga memainkan peran penting dalam diplomasi internasional melalui forum PBB. Indonesia aktif mendorong penyelesaian konflik melalui jalur dialog, negosiasi, serta penghormatan terhadap hukum internasional. Pendekatan diplomasi ini menjadi salah satu kekuatan utama Indonesia dalam membangun kerja sama antarnegara serta menciptakan hubungan internasional yang harmonis. Peran ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berpartisipasi, tetapi juga berupaya menjadi mediator dalam berbagai permasalahan global.

Peran Indonesia semakin terlihat ketika menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dalam posisi ini, Indonesia memiliki kesempatan untuk terlibat langsung dalam pengambilan keputusan terkait isu keamanan internasional. Indonesia berperan dalam pembahasan resolusi, pengambilan kebijakan, serta upaya menjaga perdamaian dunia. Meskipun terdapat tantangan seperti dominasi negara-negara besar dalam Dewan Keamanan, Indonesia tetap berupaya menyuarakan kepentingan negara berkembang dan mendorong terciptanya tatanan dunia yang lebih adil. Selain itu, Indonesia juga berperan dalam mendorong kerja sama multilateral di lingkungan PBB. Melalui berbagai forum dan

program, Indonesia berkontribusi dalam upaya mencapai tujuan bersama seperti pembangunan berkelanjutan, perdamaian, dan kesejahteraan global. Peran ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya sebagai peserta pasif, tetapi juga sebagai aktor yang turut mempengaruhi arah kebijakan global.

Dengan demikian, seluruh keterlibatan Indonesia di PBB mencerminkan implementasi nyata dari politik luar negeri bebas aktif. Indonesia berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan tanggung jawab global, serta terus berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas internasional melalui berbagai peran yang dijalankan di dalam PBB.

4.3 Posisi Strategi Indonesia

Dalam perspektif hubungan internasional, Indonesia sering dikategorikan sebagai middle power, yaitu negara dengan kapasitas menengah yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi dinamika global melalui diplomasi dan kerja sama multilateral. Sebagai middle power, Indonesia memiliki fleksibilitas untuk berperan sebagai mediator, fasilitator, maupun bridge builder antara negara maju dan negara berkembang. Posisi ini memberikan keuntungan strategis karena Indonesia dapat memainkan peran yang relatif independen tanpa terikat pada blok kekuatan tertentu.

Selain itu, Indonesia juga memiliki posisi penting sebagai representasi negara-negara Global South. Dalam berbagai forum PBB, Indonesia kerap menyuarakan kepentingan negara berkembang, terutama dalam isu-isu seperti ketimpangan ekonomi global, perubahan iklim, dan akses terhadap teknologi. Peran ini memperkuat legitimasi Indonesia sebagai aktor yang memperjuangkan keadilan global. Pengalaman Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB juga menjadi indikator penting dari posisi strategisnya. Keanggotaan ini memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan terkait isu keamanan internasional. Meskipun tidak memiliki hak veto, partisipasi dalam Dewan Keamanan tetap memberikan ruang bagi Indonesia untuk menyampaikan pandangan dan memengaruhi dinamika diskusi.

Namun demikian, pengaruh Indonesia dalam sistem internasional masih bersifat terbatas. Pengaruh tersebut lebih banyak bersandar pada soft power, seperti legitimasi moral dan kemampuan diplomasi, dibandingkan dengan kekuatan material seperti ekonomi dan

militer. Oleh karena itu, posisi strategis Indonesia dapat dikatakan kuat secara normatif, tetapi belum sepenuhnya kuat secara struktural.

4.4 Analisis Kritis

Apabila dianalisis secara lebih mendalam, posisi Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan adanya ketegangan antara aspirasi normatif dan realitas struktural. Di satu sisi, Indonesia berupaya menampilkan diri sebagai aktor yang aktif dan konstruktif dalam berbagai forum internasional. Di sisi lain, kemampuan Indonesia untuk memengaruhi keputusan strategis masih terbatas oleh struktur kekuasaan global yang hierarkis.

Kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian, misalnya, lebih mencerminkan peran sebagai pelaksana kebijakan dibandingkan sebagai penentu kebijakan. Indonesia memang aktif dalam mengirimkan pasukan, tetapi tidak memiliki kendali signifikan dalam menentukan mandat atau arah misi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi Indonesia masih berada pada level operasional, bukan strategis. Lebih lanjut, dominasi negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia dalam struktur PBB, khususnya melalui hak veto di Dewan Keamanan, menjadi faktor pembatas utama bagi negara seperti Indonesia. Dalam kondisi ini, ruang gerak Indonesia untuk memengaruhi kebijakan global menjadi sangat terbatas, sehingga perannya cenderung bersifat reaktif.

Di sisi lain, pendekatan diplomasi Indonesia yang menekankan nilai-nilai normatif seperti keadilan dan multilateralisme memang memberikan legitimasi moral, tetapi belum tentu efektif dalam menghadapi dinamika politik kekuatan. Dalam praktiknya, negara-negara besar lebih mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan prinsip-prinsip normatif, sehingga pendekatan Indonesia sering kali tidak menghasilkan dampak yang signifikan. Selain faktor eksternal, terdapat pula tantangan internal yang memengaruhi efektivitas peran Indonesia. Salah satunya adalah inkonsistensi kebijakan, terutama dalam isu hak asasi manusia. Ketidaksesuaian antara komitmen internasional dan praktik domestik dapat mengurangi kredibilitas Indonesia di mata komunitas internasional. Selain itu, keterbatasan kapasitas ekonomi juga menjadi kendala dalam meningkatkan pengaruh global, terutama dalam hal pemberian bantuan internasional dan investasi luar negeri.

Meskipun demikian, Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk meningkatkan perannya di PBB. Dengan memanfaatkan posisi sebagai middle power dan memperkuat kapasitas domestik, Indonesia dapat bertransformasi menjadi aktor yang lebih berpengaruh.

Oleh karena itu, peran Indonesia di PBB tidak dapat dikategorikan secara sederhana sebagai simbolik atau substantif, melainkan berada dalam spektrum yang dinamis antara keduanya.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa posisi Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa bersifat strategis namun belum dominan. Indonesia telah menunjukkan komitmen yang konsisten dalam mendukung perdamaian dunia, pembangunan global, dan diplomasi multilateral melalui berbagai kontribusi nyata.

Sebagai negara middle power, Indonesia memiliki kemampuan untuk memengaruhi wacana global, terutama melalui pendekatan normatif dan diplomasi persuasif. Namun, pengaruh tersebut masih terbatas oleh struktur kekuasaan internasional yang didominasi oleh negara-negara besar. Dengan demikian, posisi Indonesia dapat dikatakan kuat secara moral dan diplomatik, tetapi belum sepenuhnya kuat secara struktural.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis mengenai posisi Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, terdapat beberapa rekomendasi strategis sebagai berikut:

1. Memperkuat kapasitas diplomasi Indonesia melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam negosiasi multilateral dan penguasaan isu global strategis.
2. Meningkatkan konsistensi antara kebijakan domestik dan komitmen internasional, terutama dalam isu hak asasi manusia, guna menjaga kredibilitas di forum global.
3. Mengoptimalkan peran dalam isu global prioritas seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan pembangunan berkelanjutan agar posisi tawar Indonesia semakin kuat.
4. Memperluas dan memperdalam kerja sama internasional, baik dalam kerangka multilateral maupun bilateral, guna memperkuat jejaring dan pengaruh global.
5. Memanfaatkan posisi sebagai middle power untuk berperan aktif sebagai mediator (bridge builder) dalam berbagai isu internasional, khususnya yang melibatkan negara maju dan berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, K. W., & Snidal, D. (1998). Why states act through formal international organizations. *Journal of Conflict Resolution*, 42(1), 3–32.
- Acharya, A. (2014). *Indonesia matters: Asia's emerging democratic power*. World Scientific.
- Arhanudya, R. C., Anwar, S., & Hadisancoko, R. E. (2023). Kontribusi Indonesia dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB. *Community Development Journal*, 4(4), 9406–9410.
- Bull, H. (1977). *The anarchical society*. Macmillan.
- Cooper, A. F. (1997). *Niche diplomacy: Middle powers after the Cold War*. Macmillan.
- Djafar, W. (2016). Peran Indonesia dalam misi perdamaian dunia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Jurnal Hubungan Internasional*, 5(2), 123–134.
- Fitriani, E., & Panduwinata, A. (2018). Indonesia's role as a middle power: A case of G20 membership. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(2), 89–102. (Google Scholar)
- Frank, A. G. (1967). *Capitalism and underdevelopment in Latin America*. Monthly Review Press.
- Gideon, A. S., & Fathun, L. M. (2023). Analisis kebijakan luar negeri Indonesia di kawasan Indo-Pasifik. *Jurnal Hubungan Luar Negeri*, 11(1), 432–450. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023). *Indonesia dan PBB*. <https://kemlu.go.id>
- Hidriyah, S. (2018). Manfaat keanggotaan tidak tetap DK PBB bagi Indonesia. *Jurnal Info Singkat*, X(21).
- Hutabarat, L. F. (2015). Kerangka konseptual kontribusi pada pasukan penjaga perdamaian PBB: Studi kasus Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 11(1).
- Hurd, I. (2011). *International organizations: Politics, law, practice*. Cambridge University Press.
- Hutabarat, L. F. (2018). Peran Indonesia dalam operasi penjaga perdamaian PBB. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 6(3).
- Jubaidi, F., & Budiman, A. (2021). Indonesia's role in Afghanistan peace resolution at the UN Security Council 2019–2020. *Ilomata International Journal of Social Science*, 2(3).
- Karns, M. P., & Mingst, K. A. (2010). *International organizations* (2nd ed.). Lynne Rienner.
- Keohane, R. O. (1984). *After hegemony*. Princeton University Press.
- Leifer, M. (1983). *Indonesia's foreign policy*. London: George Allen & Unwin.
- Mearsheimer, J. J. (2001). *The tragedy of great power politics*. Norton.
- United Nations. (2024). *Troop and police contributors*. <https://peacekeeping.un.org>
- Polanunu, A. B. D., & Kusumaningrum, D. N. (2022). Indonesia sebagai middle power: Strategi niche diplomacy dalam manifestasi pembangunan kelautan berkelanjutan berbasis blue economy. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 4(2), 146–163.
- Potter, P. B. (1935). Origin of the term international organization. *American Journal of International Law*, 39(4), 803–806.

- Purba, J., & Anugrah, D. (2019). Peran Indonesia di Dewan Keamanan PBB. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 38.
- Purba, J., & Anugerah, B. (2020). Mendefinisikan (kembali) peran Indonesia di Dewan Keamanan PBB: Penjelajahan teoretikal dan praktikal dalam mewujudkan perdamaian. *Jurnal Lemhannas RI*, 7(1), 25–48.
- Refansa, D. A., & Azhar, I. Y. (2025). Peran Indonesia dalam struktur pemerintahan internasional untuk mewujudkan perdamaian global pada abad 21. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1), 1357–1364.
- Rudy, T. M. (2005). *Administrasi dan organisasi internasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Robertson, J., & Carr, M. (2023). *Middle power diplomacy in the 21st century*. Routledge.
- Said, E. (1978). *Orientalism*. Pantheon Books.
- Sukma, R. (2011). *Indonesia's international relations: Domestic, regional and global context*. *International Relations of the Asia-Pacific*, 11(3), 431–440. (Google Scholar)
- Sukma, R. (2011). *Indonesia's role in international organizations: A case of the United Nations*. *Asian Survey*, 51(3), 543–564.
- Suryokusumo, S. (2013). *Organisasi internasional*. Jakarta: UI Press.
- United Nations. (1945). *Charter of the United Nations*.
- Wuryandari, G. (2015). Kontribusi Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia. *Jurnal Penelitian Politik*, 12(1). (Open access BRIN)
- Wardhani, B. (2018). Politik luar negeri Indonesia dalam organisasi internasional. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 22(1), 45–58.
- Yani, Y. M. (2010). Politik luar negeri Indonesia dan isu global. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 14(1). (UGM e-journal)
- .